

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. PAD terdiri dari empat komponen utama yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. PAD menjadi indikator penting untuk mengukur tingkat kemandirian fiskal suatu daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan membiayai pembangunan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menempatkan pemerintah daerah sebagai peran utama dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik di wilayahnya masing-masing. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014)

Konsekuensi dari desentralisasi tersebut adalah meningkatnya tuntutan kemandirian fiskal daerah, di mana pemerintah daerah tidak lagi bergantung sepenuhnya Pada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Maka dari itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi indikator penting dalam menilai kapasitas fiskal suatu daerah, karena mencerminkan kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola potensi ekonomi lokal secara mandiri untuk membiayai pembangunan yang berkelanjutan (Halim Abdul, 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014)

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah perlu mengoptimalkan instrumen fiskal yang berkelanjutan, terutama pajak daerah yang memiliki kontribusi dominan dan relatif stabil dibandingkan retribusi maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Melalui pajak daerah, pemerintah memiliki ruang yang lebih luas untuk menggali potensi ekonomi lokal dan memperkuat kapasitas fiskal dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah (Halim Abdul, 2014; Mardiasmo, 2018). Diantara berbagai jenis pajak daerah, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan aktivitas konsumsi dan pertumbuhan sektor jasa, khususnya di daerah dengan perkembangan pariwisata yang pesat (Siahaan, 2026; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009)

Selain optimalisasi instrumen fiskal, inflasi sebagai variabel makroekonomi turut memengaruhi kinerja sektor pariwisata dan penerimaan PAD. Kenaikan inflasi dapat meningkatkan biaya perjalanan dan harga barang serta jasa di destinasi wisata sehingga menurunkan daya beli dan minat kunjungan wisatawan, yang Pada akhirnya berdampak pada penurunan penerimaan pajak hotel, restoran, dan hiburan (Siahaan, 2016) Oleh karena itu, efektivitas pemungutan dan pengelolaan pajak daerah dari sektor pariwisata menjadi krusial dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah serta mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.

Tabel 1. 1 Kontribusi PAD Kab/Kota Kawasan Bandung Raya Terhadap Provinsi Jawa Barat (Miliar Rupiah)

Kab/Kota	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Bandung	2548.25	2063.78	2195.97	2754.47	2677.74	3091.25
Kota Cimahi	360.95	375.68	405.10	394.67	394.67	500.74
kab Bandung	1078.47	1025.40	1095.96	1237.40	1111.51	1385.83
Kab Bandung Barat	528.08	464.80	540.78	667.24	646.11	799.93
Kab Sumedang	463.52	444.43	470.28	542.75	470.12	566.23
Total	4979.27	4374.09	4708.09	5596.53	5300.15	6343.984
Jawa Barat	21244.27	18521.88	20333.68	23249.62	22678.46	25311.06
Kontribusi 5 Kab/Kota terhadap Provinsi	23.44%	23.62%	23.15%	24.07%	23.37%	25.06%

Sumber : DJPK Kemenkeu

Berdasarkan Tabel 1.1, wilayah Bandung Raya memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat selama periode 2019–2024, dengan kontribusi yang secara konsisten berada pada kisaran 23–25% dari total PAD provinsi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hampir seperempat PAD Provinsi Jawa Barat berasal dari lima kabupaten/kota di kawasan Bandung Raya, sehingga kawasan ini memiliki peran strategis dalam mendukung kapasitas fiskal daerah. Besarnya kontribusi tersebut mencerminkan tingginya aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayah Bandung Raya, termasuk pada sektor jasa dan pariwisata yang menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Oleh karena itu, Bandung Raya dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki posisi yang strategis dalam pembentukan PAD Provinsi Jawa Barat sekaligus memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui optimalisasi sektor pariwisata, khususnya dari pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

Upaya peningkatan memperkuat kemandirian fiskal optimalisasi potensi Wilayah Bandung Raya untuk meningkatkan PAD melalui pajak dan retribusi sektor pariwisata yang meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang di sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang penting untuk terus dikembangkan. Dimana Bandung Raya merupakan kawasan strategis di Provinsi Jawa Barat yang memiliki posisi geografis unggul serta peran penting sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pariwisata regional. Kedekatannya dengan DKI Jakarta dan wilayah Jabodetabek menjadikan kawasan ini sebagai destinasi utama wisatawan domestik, khususnya untuk perjalanan singkat (*short getaway*). Tingginya volume kunjungan wisatawan, terutama pada akhir pekan, musim liburan, dan hari besar nasional, dapat meningkatkan aktivitas ekonomi khususnya pada pendapatan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan. (Sri et al., 2018)

Tabel 1. 2 Jumlah Kunjungan Wisatawan Di Wilayah Kawasan Bandung Raya (Orang)

Kota /Kabupaten	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Bandung	8,428,063	3,232,111	5,007,610	6,584,245	7,752,507	8,500,000
Kota Cimahi	28,156	17,542	16,326	41,030	51,265	42,927
Kabupaten Bandung	89,317	146,005	265,756	558,307	627,493	794,814
Kabupaten Bandung Barat	76,914	65,467	363,463	607,614	447,779	579,179
Kabupaten Sumedang	7,187	4,950	23,670	55,697	80,270	141,305

Sumber : Open Data Jabar

Data kunjungan wisatawan mengalami penurunan tajam Pada 2020–2021 akibat pembatasan mobilitas COVID-19, serta pemulihan signifikan Pada 2022–2024, terutama di Kota Bandung yang kembali mencapai 8,5 juta kunjungan Pada 2024. Penurunan saat pandemi berdampak langsung Pada melemahnya aktivitas hotel, restoran, dan hiburan sehingga menekan penerimaan pajak daerah. Secara teori *Tourism-Led Growth Hypothesis*, peningkatan kunjungan wisatawan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui konsumsi jasa dan perluasan basis pajak, sedangkan teori *multiplier effect* menjelaskan bahwa belanja wisatawan menciptakan efek berganda terhadap pendapatan dan penerimaan daerah, termasuk Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan sebagai komponen PAD (Halim Abdul, 2014; Mardiasmo, 2018; Siahaan, 2026)

Tingginya jumlah kunjungan wisatawan ke Bandung Raya tidak terlepas dari banyaknya dan beragamnya kawasan pariwisata yang tersebar di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang. Keberagaman destinasi wisata alam, budaya, dan buatan tersebut meningkatkan daya tarik kawasan, memperpanjang lama tinggal, serta mendorong belanja wisatawan yang berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi dan penerimaan pajak daerah sebagai komponen PAD (Cooper, 2008; UNWTO, 2018)

Tabel 1. 3 Jumlah Destinasi Wisata Di Wilayah Kawasan Bandung Raya(Lokasi)

Kota /Kabupaten	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Bandung	17	13	24	61	68	68
Kota Cimahi	6	7	7	7	9	9
Kabupaten Bandung	94	96	159	300	313	313
Kabupaten Bandung Barat	134	151	96	159	160	163
Kabupaten Sumedang	0	32	100	97	111	107

Sumber : Open Data Jabar

Perkembangan jumlah kawasan pariwisata di wilayah Bandung Raya di Jawa Barat selama periode 2021-2023. Kabupaten Bandung memiliki kawasan pariwisata terbanyak dengan 313 kawasan Pada tahun 2023, diikuti oleh Kabupaten Bandung Barat (163 kawasan) dan Kabupaten Sumedang (107 kawasan). Sementara itu, Kota Bandung memiliki 68 kawasan dan Kota Cimahi paling sedikit dengan 9 kawasan pariwisata. Secara umum, terjadi tren peningkatan jumlah kawasan pariwisata di sebagian besar wilayah, meskipun Kabupaten Sumedang mengalami penurunan dari 111 kawasan di tahun 2022 menjadi 107 kawasan di tahun 2023. Data ini mencerminkan potensi sektor pariwisata yang cukup besar di wilayah Bandung Raya, yang dapat menjadi sumber penerimaan pajak daerah khususnya dari sektor pajak hotel, restoran, dan hiburan .

Peningkatan Kawasan pariwisata yang ada di Bandung Raya setiap tahunnya menjadi tanda bahwa wilayah ini memiliki daya tarik pariwisata sangat beragam, mencakup wisata alam, wisata kuliner, serta wisata belanja dan perkotaan. Kabupaten

Bandung, Bandung Barat, dan Sumedang dikenal dengan potensi wisata alam pegunungan, kawah, danau, serta kawasan agrowisata, sementara Kota Bandung dan Cimahi berkembang sebagai pusat wisata kuliner, *fesyen*, dan hiburan perkotaan. Keragaman atraksi ini menjadikan kawasan Bandung Raya sebagai destinasi wisata unggulan nasional yang mampu menarik berbagai segmen wisatawan dengan pola konsumsi yang berbeda-beda (Februadi et al., 2019)

Berdasarkan pemaparan diatas potensi pariwisata yang dimiliki Bandung Raya memiliki peluang besar bagi peningkatan aktivitas ekonomi sektor jasa, terutama Pada subsektor hotel, restoran, dan hiburan yang menjadi sumber utama pajak daerah. Tingginya arus kunjungan wisatawan ke kawasan ini secara teoritis akan mendorong peningkatan penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Siahaan, 2016)

**Tabel 1. 4 PAD Sektor Pariwisata di Kawasan Bandung Raya Tahun 2023
(Miliar Rupiah)**

Kabupaten/Kota	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Hiburan	Total
Kota Bandung	391.21	369.16	57.32	817.69
Kota Cimahi	0.5	25.43	0.36	26.29
Kabupaten Bandung	23.35	56.8	5.38	85.53
Kabupaten Bandung Barat	16.8	49.84	2.24	68.88
Kabupaten Sumedang	4.47	25.11	3.75	33.33

Sumber : Open Data Jabar

Berdasarkan Tabel 1.4, penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan di wilayah Bandung Raya menunjukkan bahwa sektor pariwisata telah memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui

penerimaan pajak daerah. Besarnya penerimaan pajak tersebut mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi pada sektor akomodasi, kuliner, dan hiburan berkembang seiring dengan tingginya aktivitas pariwisata di kawasan Bandung Raya. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata memiliki peluang yang besar untuk terus dioptimalkan sebagai sumber penerimaan daerah melalui peningkatan kunjungan wisatawan, pengembangan destinasi wisata, serta pertumbuhan usaha jasa pariwisata. Dengan demikian, optimalisasi sektor pariwisata diharapkan mampu memperluas basis pajak daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah.

Dalam perspektif teori ekonomi, pariwisata berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah melalui meningkatnya permintaan wisatawan terhadap barang dan jasa lokal. Aktivitas belanja wisatawan Pada sektor akomodasi, kuliner, transportasi, dan hiburan memicu terjadinya *multiplier effect*, di mana pendapatan pelaku usaha selanjutnya beredar kembali ke sektor lain melalui pembayaran upah dan penggunaan input produksi lokal. Mekanisme ini memperkuat perekonomian daerah dan menempatkan sektor pariwisata sebagai salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi, khususnya di daerah yang mengandalkan pariwisata sebagai sektor unggulan

Penelitian mengenai hubungan antara sektor pariwisata dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah banyak dilakukan sebelumnya. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ende, sehingga semakin banyak

wisatawan yang berkunjung maka penerimaan PAD cenderung mengalami peningkatan (Oktavianus Keo et al., n.d. : 2021) selain itu jumlah tingkat hunian penginapan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di daerah Istimewa Yogyakarta (Liza Marie et al., 2020) Pada penelitian Analisis Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, PDRB, Jumlah Hotel, Jumlah Restoran dan Rumah Makan, Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2015 menunjukan jumlah hotel, jumlah restoran dan rumah makan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah sektor pariwisata, (Dewanti, s. et al., 2017)

Maka dari itu terdapat korelasi antara sektor pariwisata dan ekonomi lokal tersebut secara langsung berkaitan dengan penerimaan pajak daerah, terutama Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan sebagai objek pajak utama dari aktivitas wisata. Peningkatan omzet usaha jasa akibat tingginya kunjungan wisatawan seharusnya berimplikasi Pada meningkatnya penerimaan pajak daerah dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tingginya intensitas aktivitas pariwisata di wilayah strategis seperti Bandung Raya semestinya menjadi potensi besar bagi optimalisasi PAD melalui sektor pajak daerah, yang relevan untuk dianalisis secara empiris dalam penelitian ini (Siahaan, 2016)

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji pengaruh sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagian besar studi masih berfokus Pada satu wilayah administratif secara terpisah, seperti di Kabupaten Ende

atau Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga belum banyak penelitian yang menganalisis keterkaitan antarwilayah dalam satu kawasan kawasan yang saling terintegrasi secara ekonomi dan mobilitas wisatawan. Wilayah Bandung Raya yang meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang merupakan kawasan strategis yang secara spasial, ekonomi dan pariwisata saling terhubung, di mana pergerakan wisatawan tidak terikat batas administratif. Namun demikian, kajian empiris yang menganalisis pengaruh indikator pariwisata terhadap PAD secara komparatif dan simultan dalam lingkup Bandung Raya masih terbatas. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu lebih menekankan Pada variabel sektoral tanpa memasukkan faktor makroekonomi seperti inflasi sebagai variabel kontrol, Padahal inflasi berpotensi memengaruhi daya beli wisatawan, biaya operasional usaha jasa, serta penerimaan pajak daerah. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian dalam mengintegrasikan dimensi sektoral pariwisata dan faktor makroekonomi dalam satu model empiris Pada kawasan yang secara administratif berbeda namun secara ekonomi terintegrasi.

Berdasarkan berbagai fenomena dan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian mengenai kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah Bandung Raya menjadi penting untuk dilakukan. Besarnya potensi pariwisata yang dimiliki kawasan ini belum sepenuhnya tercermin dalam optimalisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Tanpa analisis yang komprehensif dan berbasis data, pemerintah daerah berisiko kehilangan

peluang fiskal yang berperan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah secara berkelanjutan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris mengenai pola kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD dalam skala kawasan kawasan. Dengan mempertimbangkan dinamika pasca-pandemi dan keterkaitan lintas wilayah, hasil penelitian dapat menjadi dasar perumusan kebijakan pajak daerah yang lebih adaptif, terintegrasi, dan berorientasi Pada penguatan kemandirian fiskal serta keberlanjutan ekonomi regional di Bandung. Oleh karena itu, judul yang akan diteliti peneliti Pada penelitian ini adalah **“ANALISIS PENGARUH SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI WILAYAH KAWASAN BANDUNG RAYA”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka diperlukan perumusan masalah untuk mengarahkan fokus penelitian mengenai pengaruh sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah Bandung Raya. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan dan karakteristik sektor pariwisata dan PAD di Kawasan Bandung Raya?
2. Bagaimana pengaruh jumlah kunjungan wisatawan terhadap PAD di Kawasan Bandung Raya?
3. Bagaimana pengaruh tingkat hunian kamar hotel terhadap PAD di Kawasan Bandung Raya?
4. Bagaimana pengaruh jumlah restoran terhadap PAD di Kawasan Bandung Raya?
5. Bagaimana pengaruh jumlah kawasan pariwisata terhadap PAD di Kawasan Bandung Raya?
6. Bagaimana pengaruh tingkat inflasi terhadap PAD di Kawasan Bandung Raya?
7. Bagaimana pengaruh sektor pariwisata dan inflasi secara simultan terhadap PAD di Kawasan Bandung Raya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perkembangan sektor pariwisata serta pengaruh beberapa indikator pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata di wilayah Bandung Raya. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui perkembangan dan karakteristik sektor pariwisata di Wilayah Kawasan Bandung Raya.
2. Mengetahui sejauh mana pengaruh jumlah kunjungan wisatawan terhadap PAD di Kawasan Bandung Raya.
3. Mengetahui sejauh mana pengaruh tingkat hunian kamar hotel terhadap PAD di Kawasan Bandung Raya.
4. Mengetahui sejauh mana pengaruh jumlah restoran terhadap PAD di Kawasan Bandung Raya.
5. Mengetahui sejauh mana pengaruh jumlah kawasan pariwisata terhadap PAD di Kawasan Bandung Raya.
6. Mengetahui sejauh mana pengaruh tingkat inflasi terhadap PAD di Kawasan Bandung Raya.
7. Mengetahui sejauh mana pengaruh sektor pariwisata dan inflasi secara simultan terhadap PAD di Kawasan Bandung Raya.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang di paparkan penulis, diharapkan penelitian ini dapat bermafaat serta memberikan kontribusi untuk pihak terkait. Adapun manfaat penelitian yang terbagi kedalam manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut :

1..4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan di bidang ekonomi pembangunan dan keuangan daerah, khususnya yang berkaitan dengan peran sektor pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan kerangka konseptual dan empiris mengenai hubungan antara aktivitas pariwisata terutama dengan faktor faktor seperti jumlah kunjungan wisatawan, tingkat hunian kamar, jumlah kawasan pariwisata dan jumlah restoran dan rumah makan terhadap kinerja fiskal daerah, serta dapat menjadi referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji topik serupa, terutama pada konteks wilayah kawasan seperti Bandung Raya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun beberapa manfaat praktis yang memberikan manfaat langsung dalam meningkatkan pengetahuan serta kesadaran dalam berpariwisata, penelitian ini

diharapkan dapat mengarah Pada impelementasi kebijakan yang lebih efektif dan inklusif. Berikut merupakan beberapa manfaat secara praktis :

1. Bagi Lembaga Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi lembaga pendidikan dalam pengembangan bahan ajar dan kajian akademik yang berkaitan dengan ekonomi pariwisata, keuangan daerah, dan analisis kebijakan publik. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai contoh penerapan metode analisis kuantitatif dalam mengkaji pengaruh variabel pariwisata dan inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Bagi Masyarakat Umum

Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai peran aktivitas pariwisata dan stabilitas harga dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Melalui peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, berkembangnya usaha perhotelan, restoran, dan kawasan pariwisata, masyarakat diharapkan semakin menyadari bahwa partisipasi dalam mendukung sektor pariwisata daerah dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

3. Bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran dalam memahami hubungan antara variabel jumlah kunjungan wisatawan, tingkat hunian kamar hotel, jumlah restoran dan rumah makan, jumlah kawasan pariwisata, serta inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian sejenis, terutama dalam pengembangan topik ekonomi pariwisata dan keuangan daerah berbasis data empiris.

4. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi media pengembangan kemampuan analisis ilmiah, khususnya dalam mengkaji pengaruh variabel-variabel pariwisata dan inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi penelitian lanjutan dengan memperluas cakupan wilayah, periode pengamatan, maupun penambahan variabel lain yang relevan dalam menjelaskan kinerja fiskal daerah.